



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 2582/SEK/PENG.KP1.1.6/IX/2023

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, Mahkamah Agung RI memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI.

**I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN PENETAPAN KEBUTUHAN**

Penetapan Kebutuhan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah 1669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

**II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENETAPAN KEBUTUHAN				JUMLAH
			PUTRA/ PUTRI LULUSAN TERBAIK	PENYAN DANG DISABI LITAS	PUTRA/ PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM	
1	Ahli Pertama - Pranata Peradilan	S-1 Hukum / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Hukum Islam / S-1 Syari'ah (Ahwal Syakhsiyah/ Jinayah/ Siyasa Syari'ah/ Muamalah)	3	-	-	22	25
2	Klerek - Analis Perkara Peradilan	S-1 Hukum / S-1 Hukum Bisnis / S-1 Hukum Dan Kewarganegaraan / S-1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik Dan Pemerintahan / S-1 Hukum Kebijakan Publik / S-1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) / S-1 Hukum Keperdataan / S-1 Hukum Otonomi Daerah / S-1 Hukum Pidana Ekonomi / S-1 Hukum Syari'ah / S-1 Syari'ah / S-1 Muamalat Jinayat	165	34	3	1442	1644
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>168</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>1464</b>	<b>1669</b>



### III. KRITERIA PELAMAR

- A. Penetapan Kebutuhan Umum merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
- B. Penetapan Kebutuhan Khusus terdiri dari:
  1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/ *Cumlaude*
    - a. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul serta Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan lulus "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* pada ijazah atau transkrip nilai;
    - b. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, dapat melamar setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama.
  2. Penyandang Disabilitas yang dibuktikan dengan:
    - a. surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
    - b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai Jabatan yang dilamar.
  3. Putra/Putri Papua dan Papua Barat merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan:
    - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
    - b. surat keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Suku.

### IV. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia;
10. Berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol);



12. Bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri wajib mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol);
13. Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

### A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 17 September 2023 dan ditutup pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga pelamar;
2. Setelah melakukan pendaftaran, pelamar kembali login ke laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun yang telah didaftarkan dan memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan serta jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan daftar isian;
3. Khusus dokumen Surat Lamaran dan Surat Pernyataan wajib dibubuhkan *e-meterai* yang telah terintegrasi dengan laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;
4. Apabila telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

### B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pelamar wajib mengunggah persyaratan *scan* dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih) pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI yang diketik menggunakan Komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan *e-meterai* (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
3. Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, dengan ketentuan:
  - a. Bagi pelamar penetapan kebutuhan Umum, Penyandang Disabilitas, dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat sebagai berikut:
    - 1) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
    - 2) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dari Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
    - 3) Surat Akreditasi atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau tangkapan layar (*screen capture*) dari Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan.
  - b. Bagi pelamar penetapan kebutuhan Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* sebagai berikut:
    - 1) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar dengan mencantumkan keterangan lulus "Dengan Pujian"/ *Cumlaude*; atau



- 2) Surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan bahwa yang bersangkutan lulus “Dengan Pujian”/ *Cumlaude* bagi yang tidak tercantum pada ijazahnya.
4. Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol);
5. Surat pernyataan yang diketik dengan komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan *e-meterai* (format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id>. dan/atau laman <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>;
6. Pas Foto formal berlatar belakang merah;
7. Bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas:
  - a. Wajib menyertakan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya;
  - b. Wajib membuat video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput link video tersebut pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> serta memastikan link dapat diakses oleh panitia seleksi;
  - c. Bagi yang tidak melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan tidak menginput *link* video keseharian pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
8. Bagi pelamar penetapan kebutuhan putra/putri Papua dan Papua Barat wajib menyertakan:
  - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
  - b. surat keterangan asli dari kelurahan/kepala desa/kepala suku, yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu.

## VI. TAHAPAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran online dan unggah dokumen dilakukan mulai tanggal 17 September s.d. 6 Oktober 2023 melalui laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>.

## VII. TAHAPAN SELEKSI

### A. Seleksi Administrasi

1. Merupakan proses verifikasi data yang diinput dan dokumen yang diunggah pelamar berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan pada pengumuman ini. Dokumen lamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
2. Bagi pelamar yang menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang tidak melampirkan persyaratan maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.

### B. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40% menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;

### C. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;

### D. Kriteria kelulusan seleksi kompetensi ditentukan berdasarkan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional;



- E. Pelamar dapat memilih lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana tercantum pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>.

## VIII. MASA SANGGAH

### A. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

1. Waktu yang diberikan untuk pelamar mengajukan sanggahan terhadap pengumuman Seleksi Administrasi paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan dari pelamar. Jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

### B. Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi

1. Waktu yang diberikan untuk pelamar mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi akhir paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan;
2. Waktu tanggapan sanggah dan pengumuman ulang hasil akhir seleksi diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## IX. JADWAL SELEKSI

Jadwal seleksi sebagaimana Surat Plt. Kepala BKN Nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
<b>TAHAPAN PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN</b>		
1.	Pengumuman Seleksi	16 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d. 6 Oktober 2023
<b>TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI</b>		
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d. 9 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d. 13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 s.d. 16 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	14 s.d. 18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d. 23 Oktober 2023
<b>TAHAPAN SKD dan SKB</b>		
8.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan tempat SKD CPNS	31 Oktober s.d. 3 November 2023
9.	Pelaksanaan SKD CPNS	4 s.d. 13 November 2023
10.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	15 s.d. 17 November 2023
11.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 November 2023
12.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 November 2023
13.	Pengumuman Pasca Sanggah	22 s.d. 27 November 2023
14.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta	1 s.d. 3 Desember 2023
15.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan tempat SKB CPNS dengan CAT	8 s.d. 10 Desember 2023
16.	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	11 s.d. 17 Desember 2023
17.	Integrasi Nilai SKD dan SKB	18 s.d. 30 Desember 2023

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
TAHAPAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CPNS		
18.	Pengumuman kelulusan	31 Desember 2023 s.d. 7 Januari 2024
19.	Masa Sanggah	8 s.d. 10 Januari 2024
20.	Jawab Sanggah	8 s.d. 14 Januari 2024
21.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	11 s.d. 17 Januari 2024

Catatan:

1. Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui laman <https://mahkamahagung.go.id>, <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id> dan <https://daftar-sscASN.bkn.go.id>.
2. Jadwal dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.
3. Peserta wajib memantau informasi jadwal di *website* tersebut.

## X. LAIN-LAIN

- A. Pelamar wajib membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
- B. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu penetapan kebutuhan jabatan;
- C. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Mahkamah Agung RI, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
- D. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, maka dinyatakan gugur;
- E. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani ternyata tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar yang bersangkutan;
- F. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil kelulusan setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
- G. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sedang menempuh Pendidikan Sarjana (S-1), Pascasarjana (S-2) atau Doktor (S-3), tidak diberikan izin untuk melanjutkan perkuliahannya sampai dengan memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sebagai PNS;
- H. Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) tetapi mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja sesuai Keputusan CPNS dianggap mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan ASN 1 (satu) periode berikutnya dan membayar ganti rugi sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- I. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- J. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;



- K. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;
- L. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>, <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>;
- M. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi *helpdesk* melalui:
  - 1. *e-mail* : [rekrutmen.casn@mahkamahagung.go.id](mailto:rekrutmen.casn@mahkamahagung.go.id);
  - 2. *WhatsApp* : +62 822-11011-667 pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
  - 3. *Telegram* : CASN MAHKAMAH AGUNG;
  - 4. *X* : @CASN\_MA\_RI;
  - 5. *Instagram* : rekrutmencasn.mahkamahagung;
- N. Pelayanan dan penjelasan terkait sistem SSCASN, dapat menghubungi menu *helpdesk* pada laman <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id>.
- O. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan seleksi CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan melalui *Whistleblowing System* Mahkamah Agung RI, pada laman <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.
- P. Seluruh pelaksanaan seleksi CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 September 2023  
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
Selaku  
Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,  
  
Sugiyanto



NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA - PRANATA PERADILAN	25	MAHKAMAH AGUNG RI	KEPANITERAAN	25
2	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	1644	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	3
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON	3
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWA	3
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI SIGLI	2
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI IDI	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI JANTHO	2
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI SINABANG	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI SINGKIL	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI BIREUEN	2
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI CALANG	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	2
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI SABANG	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI LANGSA	2
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN TINGGI MEDAN	2
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI MEDAN	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	4
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI KISARAN	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI STABAT	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI BINJAI	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	2
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	1
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI BALIGE	3
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	1



NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI	3
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN TINGGI PADANG	2
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI PADANG	3
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	3
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	2
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI PAINAN	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI KOTO BARU	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI MUARO	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI SOLOK	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	1
			PENGADILAN TINGGI RIAU	PENGADILAN TINGGI RIAU	1
			PENGADILAN TINGGI RIAU	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	3
			PENGADILAN TINGGI RIAU	PENGADILAN NEGERI DUMAI	4
			PENGADILAN TINGGI RIAU	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	3
			PENGADILAN TINGGI RIAU	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	2
			PENGADILAN TINGGI RIAU	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	3
			PENGADILAN TINGGI RIAU	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	3
			PENGADILAN TINGGI RIAU	PENGADILAN NEGERI RENGAT	3
			PENGADILAN TINGGI RIAU	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	2
			PENGADILAN TINGGI RIAU	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	3
			PENGADILAN TINGGI RIAU	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	3
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN TINGGI JAMBI	1
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN NEGERI JAMBI	3
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN NEGERI BANGKO	2
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	1
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	1
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN NEGERI SENGETI	1
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	1
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	1
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	2
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN NEGERI TEBO	1
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	1
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	2
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	3
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU	3

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	3
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG	3
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	3
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	3
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI LAHAT	3
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	1
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	1
			PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	1
			PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	3
			PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	3
			PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	1
			PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	1
			PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	2
			PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN NEGERI BATAM	4
			PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN NEGERI NATUNA	1
			PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	3
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	1
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	3
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PENGADILAN NEGERI CURUP	2
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PENGADILAN NEGERI MANNA	1
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	1
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	1
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PENGADILAN NEGERI TAIS	1
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PENGADILAN NEGERI TUBEI	1
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	1
			PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	2
			PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	3
			PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI METRO	2
			PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI KALIANDA	3
			PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	3
			PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	2
			PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI LIWA	1
			PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	3
			PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	1
			PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	2
			PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	1
			PENGADILAN TINGGI BANTEN	PENGADILAN TINGGI BANTEN	2
			PENGADILAN TINGGI BANTEN	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	3
			PENGADILAN TINGGI BANTEN	PENGADILAN NEGERI SERANG	3
			PENGADILAN TINGGI BANTEN	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	2
			PENGADILAN TINGGI BANTEN	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	1
			PENGADILAN TINGGI JAKARTA	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	3

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI JAKARTA	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	4
			PENGADILAN TINGGI JAKARTA	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	3
			PENGADILAN TINGGI JAKARTA	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	4
			PENGADILAN TINGGI JAKARTA	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	3
			PENGADILAN TINGGI JAKARTA	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	5
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	4
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI BEKASI	4
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	4
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	4
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	4
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI DEPOK	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI SUMBER	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI BOGOR	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI SUBANG	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI GARUT	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI CIREBON	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	3
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	1
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	2
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	4
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	4
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI CILACAP	4
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI KLATEN	4
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI PATI	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI TEGAL	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	4
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI KUDUS	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI JEPARA	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI UNGARAN	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI KENDAL	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	3

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	2
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI MUNGKID	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	2
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	2
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI BLORA	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	2
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI SLAWI	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI BREBES	2
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI DEMAK	3
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	1
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR	2
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI BATANG	2
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	1
			PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI REMBANG	1
			PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	2
			PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	3
			PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	4
			PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	PENGADILAN NEGERI WATES	3
			PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	PENGADILAN NEGERI BANTUL	3
			PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	1
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	5
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	4
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI GRESIK	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI JEMBER	4
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	4
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI MALANG	4
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI BLITAR	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI TUBAN	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	3

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI BANGIL	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI KOTA MADIUN	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI KEPANJEN	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	2
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI PACITAN	1
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	1
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN	2
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	2
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI NGAWI	2
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	3
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	2
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	2
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	1
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	1
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	2
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	3
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	3
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	3
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI PELAIHARI	3
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	3
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	2
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI BARABAI	2
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	2
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	2
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI RANTAU	2
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	2
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	3
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	1
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	3
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	3
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	3
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	1
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	3
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	1
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	1
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	1
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	2
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	3
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	3
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI SINTANG	2
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	2
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	3
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	1
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	1
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	2
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI NGABANG	1
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	1
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	3
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	4
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	3
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	3
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEB	2
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	3
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	PENGADILAN NEGERI BONTANG	1
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	1
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	1
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	2
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	3
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	2
			PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	PENGADILAN NEGERI MALINAU	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	4
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	3
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	3
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI SENKANG	3
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI MAROS	3
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	2
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI MAKALE	3
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI PALOPO	3
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	2
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	2
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI SINJAI	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI BARRU	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI PINRANG	2
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI MALILI	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	PENGADILAN NEGERI PALU	3
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	PENGADILAN NEGERI POSO	3
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	PENGADILAN NEGERI LUWUK	3
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	PENGADILAN NEGERI TOLI – TOLI	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	2
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	PENGADILAN NEGERI PARIGI	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	PENGADILAN NEGERI BUOL	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	PENGADILAN NEGERI KENDARI	3
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	3
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	3
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	PENGADILAN NEGERI RAHA	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	PENGADILAN NEGERI UNAHA	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	1
			PENGADILAN TINGGI MANADO	PENGADILAN TINGGI MANADO	1
			PENGADILAN TINGGI MANADO	PENGADILAN NEGERI MANADO	3
			PENGADILAN TINGGI MANADO	PENGADILAN NEGERI TONDANO	3
			PENGADILAN TINGGI MANADO	PENGADILAN NEGERI BITUNG	3
			PENGADILAN TINGGI MANADO	PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU	3
			PENGADILAN TINGGI MANADO	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	3
			PENGADILAN TINGGI MANADO	PENGADILAN NEGERI AMURANG	1
			PENGADILAN TINGGI MANADO	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	3
			PENGADILAN TINGGI GORONTALO	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	1
			PENGADILAN TINGGI GORONTALO	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	3
			PENGADILAN TINGGI GORONTALO	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	3
			PENGADILAN TINGGI GORONTALO	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	1
			PENGADILAN TINGGI GORONTALO	PENGADILAN NEGERI MARISA	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	2
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	2
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	PENGADILAN NEGERI MAJENE	1
			PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	1
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	2

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	3
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	PENGADILAN NEGERI TABANAN	3
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	3
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	3
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	PENGADILAN NEGERI NEGARA	2
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	PENGADILAN NEGERI AMLAPURA	2
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	PENGADILAN NEGERI BANGLI	2
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	1
			PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	1
			PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	PENGADILAN NEGERI MATARAM	3
			PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	2
			PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	PENGADILAN NEGERI RABA BIMA	3
			PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	PENGADILAN NEGERI SELONG	3
			PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	PENGADILAN NEGERI DOMPU	1
			PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	PENGADILAN NEGERI PRAYA	2
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN TINGGI KUPANG	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI KUPANG	3
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	2
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI ENDE	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI SO-E	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI RUTENG	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI KALABAHU	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJU	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	2
			PENGADILAN TINGGI AMBON	PENGADILAN TINGGI AMBON	1
			PENGADILAN TINGGI AMBON	PENGADILAN NEGERI AMBON	2
			PENGADILAN TINGGI AMBON	PENGADILAN NEGERI MASOHI	1
			PENGADILAN TINGGI AMBON	PENGADILAN NEGERI TUAL	1
			PENGADILAN TINGGI AMBON	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	1
			PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	1
			PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	PENGADILAN NEGERI TERNATE	3
			PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	PENGADILAN NEGERI SOA-SIO	1
			PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	PENGADILAN NEGERI LABUHA	1
			PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	PENGADILAN NEGERI TOBELO	1



NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	1
			PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	3
			PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	PENGADILAN NEGERI WAMENA	1
			PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	1
			PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	PENGADILAN NEGERI BIAK	1
			PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	PENGADILAN NEGERI NABIRE	1
			PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	PENGADILAN NEGERI SERUI	1
			PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	PENGADILAN NEGERI TIMIKA	1
			PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	1
			PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	3
			PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	PENGADILAN NEGERI SORONG	3
			PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	PENGADILAN NEGERI FAK-FAK	1
			MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH	MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH	2
			MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH	MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH	2
			MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH	MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON	1
			MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH	MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWA	1
			MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH	MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI	1
			MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH	MAHKAMAH SYAR'YAH BIUREUN	1
			MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH	MAHKAMAH SYAR'YAH SUKA MAKMUE	1
			MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH	MAHKAMAH SYAR'YAH BLANGPIDIE	1
			MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH	MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA SUBULUSSALAM	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA MEDAN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA KISARAN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA STABAT	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA PANDAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA BINJAI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA PADANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	2

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA PAINAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA TALU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA SOLOK	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA DUMAI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA RENGAT	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAIAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PENGADILAN AGAMA JAMBI	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PENGADILAN AGAMA BANGKO	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PENGADILAN AGAMA SENGETI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	2

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA LAHAT	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	PENGADILAN AGAMA MENTOK	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN AGAMA BATAM	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN AGAMA NATUNA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PENGADILAN AGAMA CURUP	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PENGADILAN AGAMA MANNA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PENGADILAN AGAMA LEBONG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PENGADILAN AGAMA TAIS	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PENGADILAN AGAMA KEPAHANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA METRO	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA KRUI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA MESUJI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	PENGADILAN AGAMA SERANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	PENGADILAN AGAMA CILEGON	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA GARUT	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA SUBANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA SUMBER	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA BOGOR	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA BEKASI	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA DEPOK	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA CIREBON	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA BANJAR	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA SOREANG	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA CILACAP	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA KENDAL	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA BREBES	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA SLAWI	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA PATI	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA JEPARA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA BATANG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA KAJEN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA KLATEN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA BLORA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA REMBANG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA KUDUS	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA DEMAK	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA TEGAL	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	PENGADILAN AGAMA WATES	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	2

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	PENGADILAN AGAMA BANTUL	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA BLITAR	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA JEMBER	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA TUBAN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA BANGIL	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA GRESIK	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA PACITAN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA NGAWI	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA NEGARA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	2

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA BARABAI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA BATU LICIN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA RANTAU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN AGAMA SINTANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN AGAMA PUTUSIBAU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PENGADILAN AGAMA BONTANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA MAKASSAR	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA SENGGANG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA PINRANG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA PAREPARE	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA MAROS	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA JENEPONTO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA SINJAI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA BARRU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA PALOPO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA BELOPA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PENGADILAN AGAMA MALILI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PENGADILAN AGAMA PALU	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PENGADILAN AGAMA LUWUK	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PENGADILAN AGAMA DONGGALA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PENGADILAN AGAMA POSO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PENGADILAN AGAMA TOLI-TOLI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PENGADILAN AGAMA BUOL	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PENGADILAN AGAMA PARIGI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PENGADILAN AGAMA AMPANA	1



NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PENGADILAN AGAMA KENDARI	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PENGADILAN AGAMA UNAHA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PENGADILAN AGAMA RAHA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	PENGADILAN AGAMA MANADO	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	PENGADILAN AGAMA TONDANO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	PENGADILAN AGAMA BITUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	PENGADILAN AGAMA LOLAK	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	PENGADILAN AGAMA BOROKO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	PENGADILAN AGAMA MARISA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	PENGADILAN AGAMA MAJENE	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PENGADILAN AGAMA MATARAM	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PENGADILAN AGAMA BIMA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PENGADILAN AGAMA PRAYA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PENGADILAN AGAMA SELONG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PENGADILAN AGAMA DOMPU	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	PENGADILAN AGAMA BADUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	PENGADILAN AGAMA KUPANG	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	PENGADILAN AGAMA AMBON	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	PENGADILAN AGAMA MASOHI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	PENGADILAN AGAMA TUAL	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	PENGADILAN AGAMA TERNATE	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	PENGADILAN AGAMA LABUHA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	3
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	PENGADILAN AGAMA SENTANI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	PENGADILAN AGAMA NABIRE	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	2
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	PENGADILAN AGAMA FAK-FAK	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	PENGADILAN AGAMA SORONG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	1
			PENGADILAN MILITER UTAMA JAKARTA	PENGADILAN MILITER UTAMA JAKARTA	3
			PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN	PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN	2
			PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA	PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA	2
			PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA	PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ACEH	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	2

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	SATUAN KERJA TK. BANDING	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	2
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	2
	<b>TOTAL</b>	<b>1669</b>			<b>1669</b>

## Lampiran II

Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung  
Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi  
Nomor : 2582/SEK/PENG.KP1.1.6/IX/2023  
Tanggal : 15 September 2023

(kota) , (tanggal) (bulan) 2023

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
di  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat /Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
IPK : 0.00 (nol titik nol nol)  
Jabatan yang dilamar :  
Jenis Penetapan Kebutuhan : Umum / Khusus (Lulusan Terbaik/ Disabilitas/ Putra/i Papua/Papua Barat) \*  
Alamat :  
Nomor Handphone/WA (aktif) :  
e-mail :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Instansi Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan dari Dukcapil;
2. Scan Asli Ijazah dan Transkrip Nilai;
3. Scan Asli/Fotocopy Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi pada saat kelulusan;
4. Scan Asli Surat Pernyataan;
5. Scan Asli Surat Keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang dilamar (bagi Pelamar Penyandang Disabilitas);
6. Scan Asli Sertifikat/Surat Keterangan Lulus "Dengan Pujian"/*Cumlaude* (bagi Pelamar Lulus Terbaik apabila keterangan tersebut tidak tercantum dalam Ijazah atau Transkrip Nilai);
7. Scan Asli akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan Surat keterangan asli dari kelurahan/kepala desa/kepala suku, yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu (bagi pelamar Putra/i Papua/Papua Barat);

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya unggah adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data dan dokumen yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

*e-Meterai*      Tanda Tangan

(nama pelamar)

\*) pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :  
Alamat (sesuai KTP) :  
Pekerjaan pada KTP :  
Program studi/ Jurusan :  
Jabatan yang dilamar :

Merupakan Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2023, menyatakan:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Bersedia ditempatkan di Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia;
8. Tidak akan mengajukan permohonan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
9. Tidak akan mengajukan izin perkuliahan sampai dengan memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sebagai PNS.
10. Bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika dikemudian hari saya mengundurkan diri setelah mendapatkan persetujuan NIP.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila terbukti tidak benar, maka saya bersedia digugurkan atau dibatalkan kelulusan pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Tahun 2023.

Yang menyatakan,

<i>e-Meterai</i>	Tanda Tangan
------------------	--------------

(nama pelamar)

Catatan :

*Point* 1 s.d. 10 wajib tercantum dalam surat pernyataan. Apabila ada *point* yang tidak termuat atau diganti maka dianggap tidak sah dan digugurkan.